

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan di negara Indonesia, baik pembangunan yang bersifat fisik seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yaitu sumber daya manusianya benar-benar memerlukan biaya yang cukup besar. Pajak yang sudah kita kenal keberadaannya dari zaman Kerajaan Sriwijaya ataupun Kerajaan Majapahit hingga sekarang ini benar-benar memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan negara Indonesia.

Pendapatan pemerintah terbesar yang memenuhi kas negara disamping pendapatan-pendapatan lainnya, bersumber dari pajak daerah di seluruh Indonesia baik di TK. I (Propinsi) maupun di PEMKO (Kabupaten dan Kotamadya). Pajak berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan disegala sektor, guna terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan spritual berdasarkan Pancasila.

Organisasi pada umumnya menghendaki agar harta bendanya terlindungi, oleh karena itu perlu bagi perusahaan untuk memperkuat pengendalian internnya, dan hal ini bisa diperoleh dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan

dengan baik dan efektif akan meningkatkan efektivitas pengendalian intern, sehingga diperoleh data akuntansi dan laporan keuangan yang handal, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi merupakan faktor penting bagi KANTOR DISPENDA MEDAN, terlebih yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak daerah. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi ini dengan judul "PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR DISPENDA PEMKO MEDAN".

## **B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Dengan diterapkannya sistem informasi akuntansi pada KANTOR DISPENDA MEDAN, maka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi adalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah yang ditetapkan Pemerintah Daerah belum mencapai target yang diinginkan ?
2. Apakah sistem informasi akuntansi mengenai penerimaan pajak daerah belum efektif dan belum dapat menunjukkan informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ?